

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian	9
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11

1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan	14
1.5.5	Analisa Bahan Hukum	14
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika	14
BAB II AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
NOMOR 6-13-20/PUU-VIII/2010		
16		
2.1	Sejarah Pelarangan Buku di Indonesia	16
2.2	Putusan Mahkamah Konstitusi	27
2.3	Amar Putusan dan <i>Dissenting Opinion</i>	41
2.4	Buku dalam Undang-Undang Sistem Perbukuan	46
2.4.1	Bentuk, Jenis, dan Isi buku	47
2.4.2	Kriteria Buku yang Dilarang	49
2.4.3	Para Pemangku Kepentingan	53
2.5	Dampak Pelarangan Buku	56
BAB III PELARANGAN BUKU KAITANNYA TERHADAP STANDAR		
HUKUM HAK ASASI MANUSIA		
58		
3.1	Hak Asasi Manusia	59
3.2	Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia	62
3.3	Kebebasan Ekspresi	68
3.4	Hak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Yang Adil serta Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum	71

3.5 Kebebasan Akademik	74
3.6 Pembatasan Kebebasan Ekspresi	78
3.7 Pengaturan Pelarangan Buku	83
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	86
4.2 Saran	87
DAFTAR BACAAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konsep perbandingan HAM: Pancasila, Barat, dan Marxis	64
--	----

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme

Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2533).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2900).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010